

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



**DEPUTI VI
BIDANG KOORDINASI
KESATUAN BANGSA
TAHUN 2024**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024 merupakan suatu dokumen bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya dokumen tersebut ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereviu dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

RKT Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada satu tahun siklus penganggaran. Demikian juga, merujuk pada model sistem perencanaan yang berlaku bagi instansi pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) dan Agenda Prioritas Kemenko Polhukam yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis (Resntra) Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sebagai bagian dari Kemenko Polhukam, maka tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RKT merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020-2024. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini, dapat diwujudkan oleh para pejabat dan staf di lingkungan Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan

Bangsa sebagai penerima amanah kepada pimpinan dan *stakeholdernya* sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Jakarta, Februari 2024
Deputi VI Bidang Koordinasi
Kesatuan Bangsa



Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	6
1.4 Evaluasi Capaian Tahun 2023	7
BAB II ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	8
2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	8
2.2 Target dan Kinerja Nasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	11
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	12
2.4 Target dan Kinerja Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	14
BAB III ISU STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN	16
3.1 Isu Strategis Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	16
3.2 Program Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	16
3.3 Kegiatan Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	16
3.4 Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	17
BAB IV PENDANAAN	19
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

RKT Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada satu tahun siklus penganggaran.

Penyusunan RKT Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa TA. 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran langkah-langkah pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2024. Selain itu RKT diharapkan dapat memberikan informasi rencana kerja yang terukur kepada pemberi mandat maupun unit organisasi atas kinerja yang harus dicapai. Maksud dari penyusunan RKT Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju, maka tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RKT merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya merujuk pada ketetapan-ketetapan di atas dan sesuai dengan hasil analisis terhadap dinamika lingkungan strategis dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, maka Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 ditujukan untuk memenuhi akuntabilitas kinerja dan anggaran di lingkungan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

1.3 Dasar Hukum Rencana Kerja Tahunan

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- 8) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 9) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024;

- 10) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Evaluasi capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	75 %	100 %	133 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	69 %	82 %	118 %
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB (79)	BB (79,9)	101 %
	2. Nilai PMPRB;	32	34,73	108 %
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	100 %
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	86	93	108 %

BAB II

ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;• Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);• Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan• Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none">• Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;• Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan• Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.

Arah kebijakan dan strategi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dengan memperhatikan RPJMN mengenai arah kebijakan dan strategi bidang Polhukhankam. Arah kebijakan dan strategi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan

akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, secara ringkas dijelaskan pada tabel dibawah ini.

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
1	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program internalisasi nilai Pancasila dan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dan pemahaman hak konstitusional warga negara. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
2	Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program internalisasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Ketetapan MPR. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan etika kehidupan berbangsa. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
3	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah. • Adanya program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
4	Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program pembauran kebangsaan. • Fenomena sosial yang mendorong eksklusivisme interaksi sosial berdasarkan kesamaan SARA tertentu. 	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi perbaikan. 	
5	Gerakan Moderasi Beragama.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan kegiatan memperkuat moderasi beragama. • Fenomena kehidupan beragama yang mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama. • Keberadaan dan peran FKUB. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan
6	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program yang meningkatkan kepedulian sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap bangsa. • Fenomena ancaman kekinian. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
7	Sinergitas TNI/POLRI dan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk sinergi Kerja sama TNI dan Polri. • Keberadaan dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Rekomendasi perbaikan 	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
8	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan program kegiatan pembinaan bela negara. • Pembentukan peraturan pelaksana UU PSDN. • Pengaturan Resimen Mahasiswa. 	Koordinasi Kesadaran Bela Negara
9	Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada.	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus kampanye hitam, politik identitas, politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. • Kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Kewaspadaan Nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
10	Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pilkada.	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus-kasus ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada • Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
11	Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada • Kebijakan dan Program untuk meningkatkan partisipasi pemilih. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
12	Isu Aktual Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Isu-isu lain yang berpotensi mengurangi kesatuan bangsa. • Kebijakan dan program yang ada. • Rekomendasi perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Wawasan Kebangsaan • Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan • Koordinasi Kewaspadaan Nasional • Koordinasi Kesadaran Bela Negara

2.2 Target dan Kinerja Nasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Sasaran, Indikator, dan Target Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	75%

	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	75%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	79
	2. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	94
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	87
	4. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	4

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 10.

Tahapan RPJPN 2005-2024

Kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3

Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Polhukhankam Tahun 2024

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; • Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); • Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan • Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; • Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan • Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.

2.4 Target dan Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Berikut ini adalah sasaran strategis yang akan dicapai oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2024:

- a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif; dan
- b) Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator yang disusun sebagai berikut:

Tabel 4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bidang Polhukhankam
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	75%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	75%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	79
	2. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	94
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	87
	4. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	4

Strategi pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

BAB III

ISU STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Isu Strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

1. PN-04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, khususnya terkait dengan Program Prioritas 01 - Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa, dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter serta Program Prioritas 03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.
2. PN-07 tentang Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya terkait Program Prioritas 01 - Konsolidasi Demokrasi.

3.2 Program Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bidang politik, hukum, dan keamanan, Kemenko Polhukam mengawal dua program yakni program teknis dan program generik sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

3.3 Kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Pelaksanaan program koordinasi kebijakan yang dikawal oleh Kemenko Polhukam terdiri dari empat Keasdepan yang berada di bawah Eselon II Kemenko Polhukam dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
2. Koordinasi Kebhinnekaan;
3. Koordinasi Kewaspadaan Nasional;
4. Koordinasi Kesadaran Bela Negara;

Selain pelaksanaan program koordinasi kebijakan yang dikawal oleh Kemenko Polhukam yang dilaksanakan oleh empat Asisten Deputi di atas,

pelaksanaan program dukungan manajemen yang dikawal oleh Sekretaris Deputy VI/Kesbang dan terdiri dari tiga fungsi yakni:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy;
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

3.4 Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi kebijakan yang dikawal oleh Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui empat Asisten Deputy dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah Bidang Koordinasi Asisten Deputy terkait,
2. Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Asisten Deputy terkait,
3. Penyusunan Rekomendasi Bidang Koordinasi Asisten Deputy terkait,
4. Tindaklanjut Rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Asisten Deputy terkait.

Kemudian pelaksanaan program dan kegiatan dukungan manajemen yang dikawal oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Layanan Umum

1. Operasional Manajemen Umum
 - a. Bimtek Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 - b. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - c. FGD Penguatan Ketatalaksanaan/Evaluasi SOP dalam rangka Dukungan Kegiatan Reformasi Birokrasi
 - d. Sosialisasi Penguatan Pengawasan dalam rangka Dukungan Kegiatan Zona Integritas
2. Operasional Administrasi Ketatausahaan
 - a. Rakor Layanan Administrasi dalam rangka Implementasi SRIKANDI
 - b. Rakor Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal

B. Layanan Manajemen Kinerja Internal

3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Rencana Program dan Anggaran)
 - a. Rakor Penajaman Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
 - b. Rakor dalam rangka Perumusan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
 - c. Rakor Penelaahan Dokumen yang akan diinput dalam aplikasi SAKTI
4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi)
 - a. Rakor dalam rangka Perumusan Analisa dan Evaluasi capaian kinerja
 - b. Rakor dalam rangka Perumusan substansi dan materi muatan dalam laporan tahunan
5. Layanan Reformasi Kinerja
 - a. Rakor dalam rangka Perumusan Urgensi dalam Rencana Kinerja/RKT
 - b. Rakor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi kinerja terhadap Perjanjian Kinerja

BAB IV

PENDANAAN

Program Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024 mengacu pada agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024. Dalam penyusunan pendanaan program Kemenko Polhukam, prinsip *money follow program* tetap menjadi acuan. Hal ini berarti, pendanaan akan diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran program dengan menggunakan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*.

Alokasi pendanaan pada program Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Anggaran Per Program Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	ANGGARAN
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 2.365.494.000
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 2.365.497.000
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 1.778.860.000
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 2.365.495.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Sekretaris Deputi VI/Kesbang	Rp. 1.026.100.000
6.	Koordinasi Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 2.000.000.000
TOTAL			Rp. 11.901.446.000

Adapun dalam peningkatan kualitas layanan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian hal tersebut. Berikut alokasi pendanaan pada kegiatan-kegiatan tersebut:

Tabel 6
Rincian Anggaran Per Kegiatan Program Dukungan Manajemen Deputi VI
Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2024

No.	Program	Alokasi
1	Operasional Manajemen Umum	Rp. 180.630.000,-
2	Operasional Administrasi Ketatausahaan <i>(termasuk Automatic Adjustment Rp.64.852.000,-)</i>	Rp. 243.510.000,-
3	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran <i>(termasuk Automatic Adjustment Rp.29.857.000,-)</i>	Rp. 195.270.000,-
4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi <i>(termasuk Automatic Adjustment Rp.43.056.000,-)</i>	Rp. 281.590.000,-
5	Perencanaan dan Monev Kinerja <i>(termasuk Automatic Adjustment Rp.19.128.000,-)</i>	Rp. 125.100.000,-
	TOTAL	Rp. 1.026.170.000,-

Di dalam pelaksanaannya, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan memantau secara khusus pelaksanaan program prioritas nasional untuk memastikan peningkatan pada bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) di Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategi (Renstra) yang berjangka waktu 5 tahun. Dokumen ini memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini juga memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan melaksanakan 2 Program yang terdiri dari 7 Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja ini, maka diharapkan ada kesamaan persepsi, pola pikir, pola tindak dan pola kerja antara unit-unit kerja yang ada dalam lingkungan organisasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sehingga capaian kinerja yang akan diraih dalam kegiatan tahunan serta hasil yang akan dicapai dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Demikian perumusan Rencana Kerja Tahunan ini disusun melalui analisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Harus dipahami bahwa dinamika lingkungan strategis organisasi di bidang politik, Hukum, dan keamanan selalu berubah. Oleh sebab itu dibutuhkan fleksibilitas dalam implementasi yang tujuannya adalah peningkatan kinerja organisasi.

RENCANA AKSI TAHUN 2024
UNIT KERJA ESELON I: DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEGIATAN: KOORDINASI BIDANG KESATUAN BANGSA
UNIT KERJA ESELON II: ASISTEN DEPUTI KOORDINASI WAWASAN KEBANGSAAN

Sasaran Strategis K/L : Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran Strategis Deputi : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan		
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15				
Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Wawasan Kebangsaan	3	Rekomendasi											1. Asdep Wawasan Kebangsaan 2. Analis Kebijakan pada Asdep Wawasan Kebangsaan		
				5%	1	Rakor membahas identifikasi masalah isu 1	10%	1	FGD identifikasi masalah dan pendalaman isu strategis	5%	1	Rakor dalam rangka penyusunan rekomendasi	10%		1	FGD penyusunan rekomendasi
				5%	2	Rakor membahas identifikasi masalah isu 2	10%	2	FGD identifikasi masalah dan pendalaman isu strategis	10%	2	FGD penyusunan rekomendasi	10%		2	FGD finalisasi penyusunan rekomendasi
							10%	3	Pemantauan situasi strategis identifikasi masalah pertama							
	a. Tindak Lanjut Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (RPP PUM).															
	b. Tindak Lanjut Perubahan PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.															
	c. Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Berlandaskan 4 (Empat)															

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
Konsensus Berbangsa dan Bernegara. d. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Pembangunan Karakter Bangsa Khususnya Bagi Generasi Muda.														
						10%	4	FGD Pengumpulan data						
						15%	5	Pemantauan Dalam Rangka Pengumpulan Data						
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional		75	%			10%	1	Rakor membahas identifikasi masalah isu 3	10%	1	Pemantauan Dalam Rangka Pengumpulan Data			
						10%	2	Rakor membahas identifikasi masalah isu 4	20%	2	FGD penyusunan rekomendasi			
						20%	3	FGD identifikasi masalah dan pendalaman isu strategis						
						10%	4	Pemantauan situasi strategis identifikasi masalah pertama						
						20%	5	FGD Pengolahan data						
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang		75	%						10%	1	Rakor tindak lanjut rekomendasi	10%	1	Rakor tindak lanjut rekomendasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
	Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti							15%	2	Monitoring Rekomendasi Kebijakan	30%	2	FGD monev	
								15%	3	Monitoring Rekomendasi Kebijakan				
									20%	4	FGD monev			
dst.														
	Rencana Penarikan Dana Asdep 1/VI Wawasan Kebangsaan				627.166.000		434.682.000		811.082.000		492.618.000		2.365.494.000	

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Wawasan Kebangsaan Lintas Sektor yang Efektif
 3. KEGIATAN : Koordinasi Wawasan Kebangsaan
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan
 5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
4556.PBC	Kebijakan Bidang Politik		
4556.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan		
4556.PBC.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan	4	Rekomendasi
1	Tindak Lanjut Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (RPP PUM)	1	Rekomendasi
2	Tindak Lanjut Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.	1	Rekomendasi
3	Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Berlandaskan 4 (Empat) Konsensus Berbangsa dan Bernegara.	1	Rekomendasi
4	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Pembangunan Karakter Bangsa Khususnya Bagi Generasi Muda.	1	Rekomendasi
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75	%
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti	75	%

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.PBC	Kebijakan Bidang Politik			
4556.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan	4	Rekomendasi	
051	Identifikasi Masalah Wawasan Kebangsaan	1	Laporan	769.686.000
052	Analisis Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan	1	Laporan	292.108.000
053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Wawasan Kebangsaan	1	Laporan	657.902.000
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan	1	Laporan	645.798.000
	Total			2.365.494.000

7. RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG CAPAIAN OUTPUT

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.PBC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan Lintas Sektoral yang Efektif				
051	Identifikasi Permasalahan Koordinasi Wawasan Kebangsaan				
	1. Rapat Koordinasi Identifikasi Masalah	X	X		
	2. FGD Identifikasi Masalah	X			
	3. Pemantauan Situasi Strategis	X	X		
052	Analisis Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan				
	1. FGD		X		
	2. Pemantauan Dalam Rangka Pengumpulan Data		X	X	
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan				
	1. Rapat Koordinasi			X	
	2. FGD Penyusunan Rekomendasi			X	X
	3. FGD Finalisasi Penyusunan Rekomendasi				X
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Wawasan Kebangsaan				
	1. Rapat koordinasi Monitoring Rekomendasi Kebijakan			X	X
	2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi			X	
	3. FGD Monitoring Evaluasi			X	X

RENCANA AKSI TAHUN 2024
UNIT KERJA ESELON I: DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

**KEGIATAN: PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEMPERERAT KESATUAN BANGSA
UNIT KERJA ESELON II: ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KEBHINNEKAAN**

Sasaran Strategis K/L : Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran Strategis Deputi : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kebhinnekaan	4	Rekomendasi										1. Asdep Koordinasi Kebhinnekaan 2. Analis Kebijakan pada Asdep Koordinasi Kebhinnekaan	
	a. Rekomendasi kebijakan bidang Kearifan Lokal dan Pambauran Kebangsaan	100 %	1	Benchmarking ke wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA)	30%	1	Rakor lintas sektoral dalam rangka penyelesaian gap masalah							
		100%	2	Penyusunan regulasi terkait Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	30%	2	Rakor lintas sektoral dalam menentukan analisis kebutuhan							
	b. Rekomendasi kebijakan bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama	66%	1	Benchmarking ke wilayah dengan indeks kerukunan tinggi-rendah	30%	1	Rakor lintas sektoral dalam rangka penyelesaian gap masalah							
		66%	2	Mendorong regulasi penguatan Kerukunan Umat	30%		Rakor lintas sektoral dalam menentukan							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi									Penanggung Jawab Kegiatan			
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV		
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15				
					Beragama dan Moderasi Beragama		analisis kebutuhan									
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75	%					60%	1	FGD penyusunan rumusan rekomendasi terkait penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Moderasi Beragama						
								60%	2	FGD penyusunan rumusan rekomendasi terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA)						
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kebhinnekaan yang ditindaklanjuti	75	%								100%	1	Pemantauan dalam rangka rakor tindak lanjut rekomendasi terkait penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Moderasi Beragama			
											100%	2	Pemantauan dalam rangka rakor tindak			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
											lanjut rekomendasi terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA)	
dst.												
	Rencana Penarikan Dana Asdep 2/VI Kebhinnekaan				Rp. 457.391.000,-		Rp. 1.251.726.000,-		Rp. 458.956.000,-		Rp. 197.424.000,-	Rp.2.365.497.000,-

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa Lintas Sektoral yang Efektif
 3. KEGIATAN : Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Mempererat Kesatuan Bangsa
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Kebhinnekaan

5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
4556.PBC.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Kebhinnekaan Lintas Sektoral yang Efektif		
4556.PBC.002	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kebhinnekaan Lintas Sektoral yang Efektif		
4556.PBC.002.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinnekaan	4	Rekomendasi
	1 Rekomendasi kebijakan terkait Kearifan Lokal dan Pembauran Kebangsaan	2	Rekomendasi
	2 Rekomendasi kebijakan terkait Kerukunan Suku dan Umat Beragama	2	Rekomendasi
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75	%
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti	75	%

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.PBC.002.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kebhinnekaan Lintas Sektoral yang Efektif			
4556.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinnekaan	4	Rekomendasi	
051	Identifikasi Masalah Bidang Kebhinnekaan	4	Laporan	Rp. 550.784.000,-
052	Analisis Kebijakan Bidang Kebhinnekaan	4	Laporan	Rp. 766.515.000,-
053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Kebhinnekaan	4	Laporan	Rp. 330.195.000,-
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinnekaan	4	Laporan	Rp. 718.003.000,-
	Total			Rp. 2.365.497.000,-

7. RENCANA KEGIATAN Mendukung Capaian Output

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.PBC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kebhinekaan Lintas Sektoral yang Efektif				
051	Identifikasi Permasalahan terkait Implementasi hak pilih masyarakat hukum adat dalam Pemilihan Umum tahun 2024 difokuskan pada penyelesaian isu-isu faktual di bidang Kebhinekaan				
	1. Rapat Koordinasi sebagai sarana komunikasi dan interaksi terkait permasalahan/ <i>debottlenecking</i> bidang Kebhinekaan	X			
	2. FGD dilaksanakan dalam rangka perumusan identifikasi masalah terkait sinkronisasi kebijakan dibidang Kebhinekaan	X			
	3. Pemantauan Situasi strategis merupakan sub tahapan penyusunan identifikasi masalah dalam rangka pemantauan terhadap kebijakan dan permasalahan terkait hak pilih masyarakat hukum adat dalam Pemilihan Umum tahun 2024		X		
052	Analisis Kebijakan Bidang Kebhinekaan				
	1. FGD Penyusunan Metodologi		X		
	2. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumpulan Data		X		
	3. FGD Pengolahan Data		X		
	4. Pemantauan dalam rangka Pengumpulan Data di Kabupaten Indragiri Hulu Prov. Riau dan kota Jayapura, Prov. Papua		X		
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinekaan				
	1. Rapat Koordinasi terkait isu Implementasi hak pilih masyarakat hukum adat dalam Pemilihan Umum tahun 2024		X		
	2. FGD Penyusunan Rekomendasi isu Implementasi hak pilih masyarakat hukum adat dalam Pemilihan Umum tahun 2024			X	
054	Rekomendasi Kebijakan Bidang Bidang Kebhinekaan yang Ditindaklanjuti				
	1. Rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi isu Implementasi hak pilih masyarakat hukum adat dalam Pemilihan Umum tahun 2024			X	
	2. Monitoring rekomendasi kebijakan terkait Implementasi hak pilih masyarakat hukum adat dalam Pemilihan Umum tahun 2024				X
	3. FGD Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan				X
4556.PBC.002	Penyelesaian Permasalahan Bidang Bidang Kebhinekaan Lintas Sektoral yang Efektif				X

RENCANA AKSI TAHUN 2024
UNIT KERJA ESELON I: DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEGIATAN: BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
UNIT KERJA ESELON II: ASISTEN DEPUTI BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Sasaran Strategis K/L : Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran Strategis Deputi : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kewaspadaan Nasional	3	Rekomendasi											<ul style="list-style-type: none"> Asdep Bidang Kewaspadaan Nasional Kabid Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Analisis Kebijakan Ahli Madya
				30%	1	Rapat Koordinasi Identifikasi masalah	30%	1	FGD Analisis Kebijakan					
				40%	2	FGD membahas Identifikasi								
				10%	1	Rapat Koordinasi membahas Tindaklanjut kajian Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme	25%	1	FGD membahas Tindaklanjut kajian Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme	15%	1	FGD membahas Tindaklanjut kajian Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme		
								25%	2	Perjalanan Dinas Pencegahan				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								Penanggung Jawab Kegiatan	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
												Ketahanan Sosial Budaya Dalam Rangka menghadapi Ancaman Narkoba terhadap Generasi Muda	
	d. Rekomendasi kebijakan bidang Kewaspadaan Nasional membahas Penguatan Instrumen Cegah dan Deteksi Dini di Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa.					5%	1	Rapat Koordinasi Penguatan Instrumen Cegah dan Deteksi Dini di Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa.	10%	1	FGD membahas Penguatan Instrumen Cegah dan Deteksi Dini di Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa		
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75	%						37%	1	FGD penyusunan rumusan rekomendasi Tindaklanjutan kajian Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme		
									38%	2	FGD penyusunan rumusan rekomendasi Peningkatan Keamanan Cyber dalam Aspek Kesadaran Masyarakat terkait Menolak Penggunaan <i>Negative Campaign</i> dan <i>Black Campaign</i>		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								Penanggung Jawab Kegiatan	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti	75	%								37%	1 Pemantauan dalam rangka rakor tindak lanjut rekomendasi Pelarangan Paham/Ideologi melalui KUHP (Baru) atau <i>Criminal Policy</i>	
											38%	1 Pemantauan dalam rangka rakor tindak lanjut rekomendasi Optimalisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	
	Rencana Penarikan Dana Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional				Rp. 211.854.000,-	Rp. 491.936.000,-	Rp. 728.366.000,-	Rp. 346.704.000,-	Rp.1.778.860.000				

RENCANA AKSI TAHUN 2024
UNIT KERJA ESELON I: DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEGIATAN: BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
UNIT KERJA ESELON II: ASISTEN DEPUTI BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Sasaran Strategis K/L : Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
 Sasaran Strategis Deputi : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan		
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15				
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	1	Rekomendasi											<ul style="list-style-type: none"> Asdep Bidang Kewaspadaan Nasional Kabid Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Analisis Kebijakan Ahli Madya 		
				5%	1	Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan terkait Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	15%	1	Perjalanan Dinas Analisis Kebijakan terkait Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumbar	10%	1	FGD Tindaklanjuti Pengumpulan terkait Permasalahan Pemilu dan Pilkada	10%		1	FGD Monitoring Kebijakan Terkait Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024
				10%	2	Rapat Koordinasi Tindaklanjuti Identifikasi Permasalahan terkait Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	15%	2	Perjalanan Dinas Analisis Kebijakan terkait Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Papua Barat	10%	2	Penyusunan Rekomendasi terkait Permasalahan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	10%		2	FGD Tindak Lanjut Rekomendasi terkait Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
												Pemilu Serentak Tahun 2024		
						15%	3 Perjalanan Dinas Analisis Kebijakan terkait Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di NTB							
	Rencana Penarikan Dana Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024				Rp. 94.880.000,-		Rp. 1.057.945.000,-		Rp. 356.778.000,-		Rp. 490.397.000,-		Rp. 2.000.000.000	

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektoral yang Efektif
 3. KEGIATAN : Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional
 5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
4556.ABC	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektoral yang Efektif		
4556.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektoral yang Efektif		
4556.ABC.003.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional	4	Rekomendasi
	1. Potensi Ancaman Warga Negara Asing di Indonesia dalam Aspek Kewaspadaan Nasional dan Kesatuan Bangsa	1	Rekomendasi
	2. Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Narkoba terhadap Generasi Muda	1	Rekomendasi
	3. Evaluasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam rangka Optimalisasi Cegah dan Deteksi Dini Ancaman Terorisme.	1	Rekomendasi
	4. Penguatan Instrumen Cegah dan Deteksi Dini di Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa	1	Rekomendasi
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75	%
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti	75	%
4556.PBC.006	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	1	Rekomendasi

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektoral yang Efektif			
4556.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional	4	Rekomendasi	
051	Identifikasi Masalah Bidang Kewaspadaan Nasional	4	Laporan	Rp. 396.316.000,-
052	Analisis Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional	4	Laporan	Rp. 349.245.000,-
053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Kewaspadaan Nasional	4	Laporan	Rp. 570.196.000,-
054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional	4	Laporan	Rp. 463.103.000,-
	Total			Rp. 1.778.860.000,-

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektoral yang Efektif			
4556.PBC.006	Rekomendasi Kebijakan Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	1	Rekomendasi	
051	Identifikasi Permasalahan Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	1	Laporan	Rp. 94.880.000,-
052	Analisis Kebijakan Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	1	Laporan	Rp. 1.233.955.000,-
053	Penyusunan Rekomendasi Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	1	Laporan	Rp. 180.768.000,-
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	1	Laporan	Rp. 490.397.000,-
	Total			Rp. 2.000.000.000,-

8. RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG CAPAIAN OUTPUT

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektoral yang Efektif				
051	Identifikasi Permasalahan Koordinasi Kewaspadaan Nasional				
	1. Rapat Koordinasi Identifikasi Masalah	X			
	2. Rapat Koordinasi Pemantauan Isu Strategis	X			
	3. FGD Identifikasi Masalah		X		

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
052	Analisis Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional				
	1. Rapat Koordinasi Analisis Kewaspadaan Nasional		X		
	2. FGD Penyusunan Metodologi		X		
	3. FGD Pengumpulan Data		X		
	4. Perjalanan Dinas Pemantauan Dalam Rangka Pengumpulan Data			X	
	5. FGD Analisi Data			X	
	6. FGD Pengkajian Kebijakan			X	
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional				
	1. Pemantauan dalam rangka Penyusunan Rekomendasi			X	
	2. Diseminasi Infomasi Kebijakan		X		
	3. FGD Penyusunan Rekomendasi				X
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Kewaspadaan Nasional				
	1. Rapat koordinasi Monitoring Rekomendasi Kebijakan			X	
	2. Rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi				X
	3. FGD Monitoring Evaluasi				X
4556.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektor yang Efektif				X

9. RENCANA KEGIATAN Mendukung Capaian Output

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas Sektor yang Efektif				
051	Identifikasi Permasalahan Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024				
	1. Rapat Koordinasi Identifikasi Masalah	X			
	2. Rapat Koordinasi Pemantauan Isu Strategis	X			
052	Analisis Kebijakan Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024				
	1. FGD Pengumpulan Data			X	
	2. Perjalanan Dinas Pemantauan Dalam Rangka Pengumpulan Data		X		
053	Penyusunan Rekomendasi Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024				
	1. FGD Penyusunan Rekomendasi			X	
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024				
	1. Rapat koordinasi Monitoring Rekomendasi Kebijakan				X
	3. FGD Monitoring Evaluasi				X

RENCANA AKSI TAHUN 2024
UNIT KERJA ESELON I: DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEGIATAN: KOORDINASI PENGELOLAAN PKBN PADA LINGKUP
PENDIDIKAN, MASYARAKAT, DAN PEKERJAAN
UNIT KERJA ESELON II: ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KESADARAN BELA NEGARA

Sasaran Strategis K/L : Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran Strategis Deputi : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
Penyelesaian Permasalahan Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara	1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara	4	Rekomendasi										1. Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara 2. Kabid Bela Negara Lingkungan Pendidikan dan Pekerjaan 3. Kabid Bela Negara Lingkungan Pemukiman	
	a. Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Perguruan Tinggi guna penyempurnaan materi maupun pengembangan secara integrasi dengan kurikulum pendidikan lain	20%	1	Identifikasi permasalahan bidang kesadaran bela negara										
	b. Monitoring kelanjutan Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat				20%	2	Analisis Kebijakan bidang kesadaran bela negara							
	c. Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan dalam rangka Pemantauan dan Penguatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara								20%	4	Penyusunan rekomendasi Bidang Kesadaran bela negara			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								Penanggung Jawab Kegiatan				
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15				
	d. Peningkatan pemahaman Bela Negara kepada ASN untuk menangkal AGHT dalam kehidupan berbangsa dan bernegara										40%	4	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara			
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesadaran bela negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75	%	20%	1	Identifikasi permasalahan bidang kesadaran bela negara										
							20%	2	Analisis Kebijakan bidang kesadaran bela negara							
									20%	3	Penyusunan rekomendasi Bidang Kesadaran bela negara					
											40%	4	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti	75	%	50%	1	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	50%	1	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara							
	Rencana Penarikan Dana Asdep 4/VI Kesadaran Bela Negara					Rp. 533.498.000,-			Rp. 613.186.000,-				Rp. 607.846.000,-		Rp. 610.965.000,-	Rp. 2.365.495.000,-

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa Lintas Sektoral yang Efektif
 3. KEGIATAN : Koordinasi Pengelolaan PKBN pada Lingkup Pendidikan, Masyarakat dan Pekerjaan
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara
 5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
4556.ABC	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Kesadaran Bela Negara Lintas Sektoral yang Efektif		
4556.PBC.003	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pembinaan Kesadaran Bela Negara		
4556.PBC.003.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	4	Rekomendasi
	1 Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Perguruan Tinggi guna penyempurnaan materi maupun pengembangan secara integrasi dengan kurikulum pendidikan lain	4	Rekomendasi
	2 Monitoring kelanjutan Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.	4	Rekomendasi
	3 Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan dalam rangka Pemantauan dan Penguatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	4	Rekomendasi
	4 Peningkatan pemahaman Bela Negara kepada ASN untuk menangkal AGHT dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4	Rekomendasi
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75	%
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti	75	%

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.PBC.003.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pembinaan Kesadaran Bela Negara			
4556.PBC.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara	4	Rekomendasi	

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
051	Identifikasi Permasalahan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan pekerjaan, Pendidikan dan Masyarakat di bidang Kesadaran Bela Negara	4	Laporan	Rp. 639.012.000,-
052	Analisis Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	4	Laporan	Rp. 447.445.000,-
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	4	Laporan	Rp. 565.363.000,-
054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	4	Laporan	Rp. 713.675.000,-
	Total			Rp. 2.365.495.000,-

6. RENCANA KEGIATAN Mendukung Capaian Output

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.PBC.003	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara				
051	Identifikasi Permasalahan terkait optimalisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara difokuskan pada penyelesaian isu-isu faktual di bidang Kesadaran Bela Negara				
	1. Rapat Koordinasi sebagai sarana komunikasi dan interaksi terkait permasalahan/ <i>debottlenecking</i> bidang Kesadaran Bela Negara	X			
	2. Pemantauan Situasi Strategis dalam rangka perumusan identifikasi masalah terkait sinkronisasi kebijakan dibidang Kesadaran Bela Negara	X			
052	Analisis Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara				
	1. FGD Pengumpulan dan Pengolahan Data		X		
	2. Paket Pengkajian Kebijakan		X		
	3. Diseminasi Kebijakan		X		
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara				
	1. Rapat Koordinasi Kesadaran Bela Negara		X		
	2. FGD Penyusunan Rekomendasi			X	
054	Tindak Lanjutt Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara yang Ditindaklanjuti				
	1. Rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi isu Kesadaran Bela Negara			X	
	2. Monitoring Rekomendasi Kebijakan isu Kesadaran Bela Negara				X
	3. FGD Tindak Lanjut rekomendasi di isu Kesadaran Bela Negara				
4556.PBC.003	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara				X

RENCANA AKSI TAHUN 2024
UNIT KERJA ESELON I: DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEGIATAN: KOORDINASI BIDANG KESATUAN BANGSA
UNIT KERJA ESELON II: SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Sasaran Strategis K/L : Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran Strategis Deputi : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	79	Penilaian dengan Skala 1 s.d 100											1. Sesdep VI/Kesbang 2. Kabag Administrasi 3. Kabag Perencanaan dan Evaluasi
	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	25%	1	Rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawab	25%	1	Rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawab	25%	1	Rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawab	25%	1	Rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawab an dan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15			
					an dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		an dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		an dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
	2. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	94	Indeks penilaian dengan Skala 1 s.d 100										1. Sesdep VI/Kesbang 2. Kabag Administrasi 3. Kabag Perencanaan dan Evaluasi		
	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal			20%	1	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai	30%	1	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan	30%	1	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai	20%	1	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
					dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Salah satu pengawasan kearsipan adalah melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.		sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Salah satu pengawasan kearsipan adalah melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.		sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Salah satu pengawasan kearsipan adalah melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.		dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Salah satu pengawasan kearsipan adalah melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.			
	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi. Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	4	Skala Likert										1. Sesdep VI/Kesbang 2. Kabag Administrasi 3. Kabag Perencanaan dan Evaluasi	
	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi. Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa			25%	1 Melaksanakan pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun	25%	1 Melaksanakan pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun	25%	1 Melaksanakan pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun	25%	1 Melaksanakan pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								Penanggung Jawab Kegiatan	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
					pelayanan pada tata usaha dan umum. Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Administrasi		pelayanan pada tata usaha dan umum. Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Administrasi		pelayanan pada tata usaha dan umum. Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Administrasi		pelayanan pada tata usaha dan umum. Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Administrasi		
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	87	Indeks penilaian dengan Skala 1 s.d 100										1. Sesdep VI/Kesbang 2. Kabag Administrasi 3. Kabag Perencanaan dan Evaluasi
				25%	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran yang memperhatikan variabel sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dokumen penganggaran; 2. Keselarasan RAB dengan dokumen penganggaran;	25%	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran yang memperhatikan variabel sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dokumen penganggaran; 2. Keselarasan RAB dengan dokumen penganggaran;	25%	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran yang memperhatikan variabel sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dokumen penganggaran; 2. Keselarasan RAB dengan dokumen penganggaran;	25%	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran yang memperhatikan variabel sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dokumen penganggaran; 2. Keselarasan RAB dengan dokumen penganggaran;		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi										Penanggung Jawab Kegiatan
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%	Uraian	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
					3. Jumlah revisi; 4. Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD; 5. Capaian Output; 6. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 7. Kualitas dokumen perencanaan; 8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.		3. Jumlah revisi; 4. Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD; 5. Capaian Output; 6. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 7. Kualitas dokumen perencanaan; 8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.		3. Jumlah revisi; 4. Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD; 5. Capaian Output; 6. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 7. Kualitas dokumen perencanaan; 8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.		3. Jumlah revisi; 4. Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD; 5. Capaian Output; 6. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 7. Kualitas dokumen perencanaan; 8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.			
Rencana Penarikan Dana Sekretaris Deputi VI/Kesbang					Rp.329.308.750,-		Rp.189.133.750,-		Rp.232.664.750,-		Rp.275.062.750,-		Rp.1.026.170.000,-	

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal
 3. KEGIATAN : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Sekretaris Deputi bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
 5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
4556.EBA dan 4556.EBD	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal		
4556.EBA.962 4556.EBD.952 4556.EBD.953 4556.EBD.961	Layanan Umum Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Reformasi Kinerja		
4556.EBA.962.051	1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	79	Indeks penilaian dengan Skala 1 s.d 100
4556.EBA.962.052	2. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	94	Indeks penilaian dengan Skala 1 s.d 100
4556.EBD.952.051 4556.EBD.953.051	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	4	Skala Likert
4556.EBD.961.051	4. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	87	Indeks penilaian dengan Skala 1 s.d 100

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

A. 4556.EBA.962. Layanan Umum

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
4556.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	
051	Operasional Manajemen Umum	-	-	Rp.180.630.000,-

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
052	Operasional Administrasi Ketatausahaan	-	-	Rp.243.510.000,-
	Total			Rp.424.140.000,-

B. 4556.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
4556.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	-	-	Rp.195.270.000,-
	Total			Rp.195.270.000,-

C. 4556.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
4556.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	Rp.281.590.000,-
	Total			Rp.281.590.000,-

D. 4556.EBD.961. Layanan Reformasi Kinerja

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4556.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
4556.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	
051	Perencanaan dan Monev Kinerja	-	-	Rp.125.100.000,-
	Total			Rp.125.100.000,-

7. RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG CAPAIAN OUTPUT

A. 4556.EBA.962. Layanan Umum

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.EBA.962	Layanan Umum				
051	Operasional Manajemen Umum				

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	A. Bimtek Penyusunan SKP	V			
	B. Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)		V		
	C. FGD penguatan Ketetalaksanaan/Revisi SOP dalam rangka Dukungan Kegiatan RB		V	V	
	D. Sosialisasi ZI Penguatan Pengawasan dalam rangka Dukungan Kegiatan ZI			V	
052	Operasional Administrasi Ketatausahaan				
	A. Rakor Layanan Administrasi dalam rangka Implementasi Srikandi	V	V	V	V
	B. Rakor Persiapan Pengawasan Kerasipan Internal		V	V	

B. 4556.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran				
	A. Rakor Penajaman Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	V			
	B. Rakor dalam rangka perumusan perencanaan kebutuhan dan penganggaran	V		V	
	C. Rakor Penelaahan dokumen yang akan diinput dalam aplikasi SAKTI			V	

C. 4556.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi				
	A. Rakor dalam rangka Perumusan Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja		V		V
	B. Rakor dalam rangka Perumusan Substansi dan Materi Muatan dalam Laporan Tahunan				V

D. 4556.EBD.961. Layanan Reformasi Kinerja

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4556.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja				
051	Perencanaan dan Monev Kinerja				

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	A. Rakor dalam rangka Perumusan Urgensi dalam Renja/RKT	V			
	B. Rakor dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja terhadap perjanjian kinerja		V		V